

ANALISIS PERENCANAAN STRATEGIS PENGUATAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN BATANG



LAPORAN AKHIR

**Disusun oleh:
Tim LPPM Unsoed**

ANALISIS PERENCANAAN STRATEGIS PENGUATAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN BATANG



LAPORAN AKHIR

Disusun oleh:
Tim LPPM Unsoed

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas kekuatan yang diberikan kepada kami, sehingga serangkaian kegiatan Kajian Analisis Perencanaan Strategis Penguatan Ekonomi Lokal Kabupaten Batang dapat diselesaikan dengan baik. Secara garis besar kajian ini bertujuan untuk menyusun rumusan perencanaan strategis yang efektif bagi penguatan ekonomi lokal Kabupaten Batang. Kajian ini diawali dengan studi dokumentasi, telaah data-data sekunder, observasi dan interview kepada *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Batang, dan laporan ini merupakan output dari kajian yang dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Batang memiliki potensi yang memadai dalam rangka penguatan ekonomi lokal. Langkah awal dalam mengimplementasikan penguatan ekonomi lokal adalah dengan menyusun regulasi yang mendukung hal tersebut.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kajian ini. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi penguatan ekonomi lokal Kabupaten Batang.

Batang, Oktober 2016

Tim Peneliti LPPM Unsoed

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Output Penelitian.....	5
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penguatan Ekonomi Lokal.....	6
B. Perencanaan Strategis.....	13
C. Manajemen Strategi	22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Lokasi Penelitian	24
B. Sasaran Penelitian	24
C. Metode Penelitian.....	24
D. Fokus Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Sumber dan Jenis Data	28
G. Metode Analisis Data	29
BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG.....	33
A. Kondisi Geografis dan Wilayah	33
B. Demografi dan Sosial	35
C. Kondisi Makro Ekonomi.....	38
BAB V. ANALISIS HASIL KAJIAN	40
A. Sinkronisasi Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan.....	40
B. Potensi Ekonomi Lokal Kabupaten Batang	43
C. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.....	49
D. Strategi Penguatan Ekonomi Lokal	51
BAB V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI	58
A. Simpulan	58
B. Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Batang Tahun 2014	36
Tabel 5.1. Sumbangan Lapangan Usaha terhadap PDRB Tahun 2010 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Batang (juta rupiah) Tahun 2015	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Geologi Kabupaten Batang 2012-2017	35
Gambar 5.1. Alternatif Model Penguatan Ekonomi Lokal	55

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1988), pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat itu. Jadi, pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pencapaian tujuan pembangunan yang diharapkan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya otonomi daerah di Indonesia termasuk adanya desentralisasi fiskal. Otonomi daerah mampu mendorong keagairahan daerah untuk mengembangkan perekonomiannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Oleh

karena itu kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya agar mampu mencapai hasil pembangunan yang optimal.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi yang mengacu pada undang-undang otonomi daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi secara global. Hal ini disebabkan karena kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Abdullah dkk (2002) menjelaskan bahwa daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi yang berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daya saing daerah sangat bergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif daerah.

Sebuah contoh keberhasilan peningkatan daya saing dengan menggunakan keunggulan komparatif yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal pernah dilakukan oleh Provinsi Gorontalo. Provinsi ini pernah menjadi provinsi termiskin di Indonesia, namun hal tersebut berubah ketika Fadel Muhammad menjabat sebagai gubernur. Beliau mengoptimalkan produk unggulan Gorontalo sektor pertaniannya yakni jagung, peternakan sapi, dan ikan tuna untuk dipasarkan tidak hanya dalam skala lokal, dan nasional tetapi internasional. Upaya tersebut mampu membuat pertumbuhan ekonomi provinsi ini naik menjadi 7 – 8 persen di atas pertumbuhan ekonomi

nasional dan penduduk miskin menurun dari 72 persen menjadi 33 persen (Muhammad, 2008).

Pengalaman tersebut menggambarkan bahwa pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi potensi yang ada dan dengan prioritas program pemerintah yang mengarah pada pengembangan potensi lokal akan mendapat hasil pembangunan yang optimal dan cepat, yang akan berdampak pula pada terciptanya kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Secara otomatis pula akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang kuat.

Begitu juga Kabupaten Batang, berdasarkan data dari BPS pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku mencapai Rp 14.381.550.940 dan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 11.690.342.110. Namun jumlah pengangguran pada tahun yang sama masih mencapai 6.256 orang. Kondisi ini menandakan bahwa sektor-sektor mata pencaharian yang tercermin dalam PDRB belum dimaksimalkan potensinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Tingginya jumlah pengangguran secara tidak langsung juga menggambarkan bahwa garis kesejahteraan masyarakat masih rendah dan yang berarti tingkat kemiskinan masih relatif tinggi. Hal tersebut juga menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten Batang belum sepenuhnya dikatakan berhasil.

Pembangunan yang didukung dengan prioritas pengembangan potensi ekonomi lokal yang unggul dapat meningkatkan daya saing daerahnya. Artinya, jika pemerintah menginginkan daerahnya memiliki daya saing, maka program-program pembangunan harus berangkat dari pengembangan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki daerah tersebut. Melalui pengembangan potensi ekonomi unggulan tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Misalnya daerah yang memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, tetapi prioritas program pemerintahnya mengarah pada sektor pariwisata, maka

perkembangan sektor pertanian akan mengalami perlambatan bahkan seharusnya sektor pertanian dapat memberi distribusi ke PDRB yang tinggi dibanding sektor pariwisata, di sini distribusinya akan sedikit. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang tepat dalam rangka pembangunan daerah dinilai menjadi faktor penentu penguatan daya saing suatu daerah.

Berdasarkan observasi awal, Kabupaten Batang memang telah melakukan beberapa kali pemetaan potensi ekonomi lokal di wilayahnya melalui *product approach* tetapi tindak lanjutnya belum terlihat secara signifikan. Oleh karena itu kajian ini bermaksud untuk menganalisis potensi ekonomi lokal Kabupaten Batang sehingga dapat merumuskan rencana strategis untuk menguatkannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi ekonomi lokal Kabupaten Batang?
2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam menguatkan ekonomi lokalnya?
3. Bagaimana perencanaan strategis yang efektif untuk menguatkan ekonomi lokal Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada pertanyaan penelitian sebagaimana dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis potensi ekonomi lokal Kabupaten Batang.

2. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam menguatkan ekonomi lokalnya.
3. Merumuskan perencanaan strategis yang efektif bagi penguatan ekonomi lokal Kabupaten Batang.

D. Output Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka output dari penelitian ini adalah:

1. Gambaran riil potensi ekonomi lokal Kabupaten Batang.
2. Gambaran kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam menguatkan ekonomi lokalnya.
3. Perencanaan strategis penguatan ekonomi lokal Kabupaten Batang.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Jika tujuan penelitian ini tercapai, maka manfaat yang dapat diharapkan antara lain:

1. Memberikan peta potensi ekonomi lokal kepada Pemerintah Kabupaten Batang sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan bidang ekonomi.
2. Memberikan peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam penguatan ekonomi lokal, sehingga memudahkan dalam mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi pada saat mengimplementasikan kebijakan penguatan ekonomi lokal.
3. Memudahkan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyusun rencana strategis Kabupaten Batang khususnya dalam penguatan ekonomi lokal.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penguatan Ekonomi Lokal

Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko (2002) sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Sumihardjo (2008) menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di dalam dua dokumen rencana pembangunan tersebut tampak bidang-bidang prioritas pada setiap program daerah kabupaten/kota dalam memperkokoh pengembangan sektor unggulan. Selain itu, APBD harus mencerminkan program-program dan tujuan-tujuan pembangunan. Karena suatu rencana akan bersifat operasional apabila anggarannya tersedia. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan potensi daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan pada dasarnya adalah kunci keberhasilan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah. Mukhtianto (2005) menjelaskan bahwa pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen PDRB, komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem kelembagaan. Dalam menelaah PDRB dilakukan untuk mengetahui potensi basis dan non basis. Suatu daerah yang memiliki keunggulan memberikan kekhasan tersendiri yang tidak ada pada daerah lain, sehingga sektor unggulan

tadi dapat dikatakan sebagai kegiatan basis (Triyuwono & Yustika, 2003).

Tarigan (2007) menjelaskan bahwa teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang tidak mengekspor, yakni hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah itu sendiri. Bertambah banyaknya kegiatan basis di dalam suatu daerah akan menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan bisnis. Dengan demikian kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak pertama (*primer mover rule*), sedangkan setiap perubahan mempunyai *multiplier effect* terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis antara lain menggunakan metode analisis *location quotient* (LQ).

Dengan mengetahui kegiatan basis di suatu daerah berdasarkan potensi dimilikinya, maka dapat menguatkan daya saing daerah tersebut. Abdullah dkk (2002) menjelaskan bahwa daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Indikator-indikator utama dan prinsip-prinsip penentu daya saing daerah salah satunya adalah perekonomian daerah. Prinsip-prinsip

kinerja perekonomian daerah yang mempengaruhi daya saing daerah yakni:

1. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya jangka pendek.
2. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
3. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu.
4. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

Salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing industri di daerah adalah melalui kluster industri. Kluster industri adalah sejumlah perusahaan dan lembaga yang terkonsentrasi pada suatu wilayah, serta saling berhubungan dalam bidang yang khusus dan mendukung persaingan. Kluster tidak hanya dibangun dari hadirnya industri, tetapi industri harus saling terhubung berdasarkan rantai nilai. Kluster industri dapat dipandang sebagai suatu sistem. Setiap entitas pelaku (*stakeholders*) memiliki peran sebagai organ dalam kluster industri tersebut dan terkait satu dengan lainnya dalam metabolisme rantai nilai yang digerakkan oleh aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan dari satu organ ekonomi kepada organ lainnya sebagai energi setiap organ untuk bekerja, bergerak dan saling melayani.

Pelaku (*stakeholders*) dalam suatu kluster industri biasanya dikelompokkan kepada industri inti, industri pemasok, industri pendukung, industri terkait, dan pembeli serta institusi pendukung. Istilah inti, pendukung, dan terkait menunjukkan peran pelaku dalam kluster tertentu dan tidak ada hubungan dengan tingkat kepentingan

para pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung pada sifat ekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu.

Hasil kajian Porter terhadap sekitar 2.700 lokasi di dunia memunculkan model untuk menggambarkan daya saing lingkungan usaha mikro ekonomi yang populer disebut dengan *diamond Porter's*. Dalam kajiannya Porter menjelaskan perlunya diagnosis terhadap potensi dan masalah pada klaster industri sasaran. Diagnosis yang dilakukan dengan memetakan empat faktor penentu daya saing yakni:

1. Faktor input yang terdiri dari kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur fisik, infrastruktur administratif, dan infrastruktur inovasi.
2. Industri pendukung yang tersedia, seperti skim kredit, transportasi, kemasan, jasa konsultasi untuk industri kecil dan menengah.
3. Kondisi permintaan dan peluang permintaan yang ada dan perilaku permintaan lokal.
4. Kondisi persaingan seperti hambatan masuk pelaku baru, strategi bersaing yang dilakukan oleh pelaku yang telah ada.

Keempat faktor tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi kinerja daya saing perusahaan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah upaya memperbaiki keempat faktor di atas sehingga tahap berikutnya adalah menyusun agenda penguatan ekonomi melalui perbaikan kondisi lingkungan persaingan yang lebih memberikan penekanan pada perbaikan lingkungan usaha dan mempromosikan proses inovasi pada lingkungan usaha yang spesifik.

Selain keempat variabel tersebut, ada dua variabel tambahan yakni peluang dan pemerintah. Dalam hal kondisi faktor, penekanan Porter adalah pada penciptaan faktor produksi berkualitas tinggi, seperti sumber daya yang memiliki keahlian. Pemahaman Porter mengenai faktor produksi yang diperlukan sebuah perusahaan atau negara untuk mencapai keunggulan kompetitifnya. Kegiatan

pembentukan kluster industri dilakukan secara simultan dengan mobilisasi *stakeholders* mulai dari tahap inisiasi, perencanaan dan implementasi agenda penguatan daya saing. Kunci keberhasilan pembentukan kluster ditentukan oleh tiga faktor:

1. Perencanaan yang melibatkan seluruh *stakeholders* kunci (pihak di luar perusahaan) baik dalam pembuatan agenda, penguatan, maupun dalam berbagi tugas dan sumber daya pada pelaksanaan program. Proses perencanaan yang melibatkan partisipasi semua *stakeholders* kunci yang ada, menjadi penting agar agenda program benar-benar realistis dan dapat diterima oleh *stakeholders* sehingga dalam pelaksanaan mereka bukan hanya mendukung tetapi juga memberikan kontribusi pada berbagai kegiatan, yang pada gilirannya sangat menentukan tingkat keberhasilan program.
2. Perencanaan bersama yang dimuati oleh pendekatan yang bercirikan *market-driven* yakni:
 - a. Fokus pada upaya mempertemukan sisi penawaran dan permintaan
 - b. *Inclusive* yang mencakup tidak hanya perusahaan berskala kecil dan menengah saja tetapi juga perusahaan besar dan lembaga pendukung
 - c. *Collaborative* yakni selalu menekankan solusi kolaboratif pada isu-isu bersama dari seluruh *stakeholders* (pemerintah, BUMN dan swasta besar, pelaku industri kecil dan menengah dan berbagai lembaga sumber inovasi)
 - d. Bersifat *strategic* yang membantu *stakeholders* menciptakan visi strategis bersama yang menyangkut ekonomi serta *value-creating*, yang mengupayakan penciptaan atau peningkatan nilai tambah pelaku ekonomi.

3. Pemanfaatan sumber daya khususnya, skema *sharing* (*resource-risk* dan *benefit-sharing*) dan proses partisipatif merupakan kerangka landasan kerja yang disepakati dengan mitra kerja dan *stakeholders* kunci dalam pengembangan model bisnis dalam membangun *sustainability* prakarsa.

Walaupun kegiatan ini bersifat pemberdayaan masyarakat, hal ini tidak otomatis diartikan sebagai *charity*. Proses pemberdayaan perlu diarahkan untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku dari para pelaku usaha kecil sebagai wirausahawan sebenarnya. Setiap elemen kegiatan, diupayakan untuk dikembangkan dalam konteks model bisnis yang jelas secara proporsional. Pendekatan ini sering digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sebagai penguatan daya saing ekonomi dengan *platform* klaster industri. Pendekatan di atas bukan lagi hanya menjadi wacana, kerangka berpikir klaster industri namun sudah diuji pada beberapa daerah dan berhasil meningkatkan produktivitas masyarakat terutama usaha kecil.

Walaupun sudah diimplementasikan secara luas di Indonesia, pendekatan klaster masih menjadi perdebatan baik di kalangan akademisi maupun pelaku dunia usaha. Sebagian besar *stakeholders* mengartikan klusters sebagai “sentra”. Sentra di Indonesia diartikan memiliki kesamaan dengan definisi klaster. Pendekatan klaster sebagian besar hanya mempertimbangkan sisi produksi semata, di mana seluruh permasalahan dan peluang hanya dilihat dari sisi pandang produsen. Oleh karena itu, pada tataran implementasinya banyak upaya dukungan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pendekatan klaster hanya menciptakan solusi-solusi parsial (Bank Indonesia, 2007).

Pada kenyataannya pada sebuah klaster terdapat mata rantai nilai (*value chain*) yang selama ini secara tidak langsung menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis sehari-hari produsen di sebuah klaster. *Value chain* didefinisikan sebagai sebuah rangkaian

proses produktif mulai dari penyedia input dari suatu produk, produksi, pemasaran dan distribusi hingga ke konsumen akhir. Pendekatan ini secara sistematis memperhitungkan keseluruhan tahapan dari proses produksi. Juga analisis dari berbagai keterkaitan dan aliran informasi sepanjang rantai nilai. Pendekatan ini juga memberikan analisis terhadap mata rantai yang melalui lintas batas daerah dan bahkan antar negara, memperhitungkan pula kebutuhan pembeli dan standar-standar internasional, serta memungkinkan adanya *benchmarking* secara internasional (Ritcher, 2005).

Value chain secara umum terdiri dari tiga atau lebih pelaku, mulai dari produsen, pengolahan, distributor, para perantara penjualan, pembeli besar, pembeli retail hingga akhirnya sampai ke konsumen. Para pelaku/mitra dalam mata rantai nilai ini saling bekerja sama untuk menentukan tujuan bersama, saling berbagi risiko dan manfaat, serta melakukan investasi baik dalam hal waktu, tenaga dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan hubungan kerja diantara mereka.

Penerapan pendekatan *value chain* dalam konteks klaster industri akan menciptakan keterkaitan dan integrasi yang lebih kuat di antara para pelaku untuk memperkuat klaster itu sendiri, dan meningkatkan daya saing dari sub sektor yang bersangkutan (Bank Indonesia, 2007). Melalui pendekatan *value chain*, sektor atau sub sektor potensial dapat dilihat sebagai sebuah rangkaian dari proses produktif (fungsi-fungsi). Nilai lebih dari pendekatan *value chain* adalah kemampuannya untuk menciptakan keterkaitan institusional dan koordinasi di antara pemasok, produsen, pedagang dan distributor. Bagi pengembangan ekonomi lokal dan wilayah, pendekatan *value chain* juga dapat dijadikan sebagai model yang menciptakan keterkaitan aktif antarpelaku dalam mata rantai suatu sektor/sub sektor unggulan, serta dengan institusi dan *stakeholders* terkait

lainnya guna penguatan daya saing sektor/subsektor yang bersangkutan.

B. Perencanaan Strategis

Konsep strategi biasanya dilihat dari dua perspektif, pertama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Pengertian ini lebih mengarahkan pada peranan aktif organisasi untuk melaksanakan program sebagai strategi organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Strategi ini dikenal sebagai perencanaan strategi. Perspektif kedua strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungan sepanjang waktu. Pengertian ini lebih mengarahkan organisasi untuk bersikap pasif, yang artinya para manajer akan menanggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hanya jika mereka merasa perlu untuk melakukannya. Strategi ini dikenal sebagai strategi adaptif.

Selain kedua perspektif tersebut dikenal juga strategi *entrepreneur* yaitu strategi yang dirancang pemimpin usaha berdasarkan inisiatif untuk pertumbuhan yang konstan dengan mencari peluang baru secara aktif. Pengertian ini juga mengarahkan peranan aktif seseorang dalam hal ini adalah seorang *entrepreneur* atau wirausahawan. Ciri-ciri strategi meliputi:

1. Wawasan waktu, strategi menggambarkan kegiatan dengan cakrawala jangka panjang atau pandangan yang jauh ke depan, yaitu waktu untuk melaksanakan dan melihat hasilnya.
2. Dampak, pengaruh strategi akan sangat berarti pada hasil akhirnya.
3. Pemusatan upaya, dengan memfokuskan pada kegiatan terpilih mengharuskan pemusatan pemanfaatan sumber daya yang ada.

4. Pola keputusan, strategi mensyaratkan sederetan keputusan tertentu perlu diambil sepanjang waktu mengikuti suatu pola yang konsisten.
5. Peresapan, strategi mencakup kegiatan yang luas mulai alokasi sumber daya sampai kegiatan operasional organisasi.

Perencanaan strategis dulu lebih dikenal dengan sebutan perencanaan jangka panjang. Sebutan perencanaan strategis lebih populer. Istilah ini mengandung nuansa strategis, yaitu sifat menyeluruh (*comprehensive*), cermat (*thoughtful*), dan tepat-tempat (*well placed*) (McNamara, 1999). Istilah strategi sendiri pada mulanya “dominan” digunakan dalam kemiliteran. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis bermula di kemiliteran (Guralnic, 1986). Istilah strategi sendiri menurut *Webster's New World Dictionary*, merupakan suatu ilmu tentang perencanaan dan penggerakan operasi militer dalam skala besar atau ilmu mengenai pengerahan angkatan bersenjata menuju posisi yang lebih menguntungkan agar lebih dahulu menguasai (menempati) dibandingkan musuh (Guralnic, 1986; Dinukil Lerner, 1999).

Dalam organisasi non militer, perencanaan strategis muncul pertama kali pada tahun 1950-an dan semakin lebih populer dan dipergunakan di mana-mana sekitar pertengahan 1960-an sampai pertengahan 1970-an, yaitu ketika banyak orang yakin bahwa perencanaan strategis merupakan jawaban terhadap segala persoalan yang dihadapi organisasi. Setelah mengalami “*booming*” kepopuleran pada tahun-tahun tersebut, perencanaan strategis tersisihkan dan dilupakan orang selama beberapa dekade. Baru pada tahun 1990-an perencanaan strategis terhidupkan kembali karena dianggap merupakan suatu proses yang memberikan suatu kemanfaatan dalam konteks tertentu (Mintzberg, 1994).

Perencanaan strategis dirumuskan oleh McNamara (1999), sebagai penetapan arah akan kemana suatu organisasi di masa yang

akan datang disertai dengan penetapan cara bagaimana organisasi tersebut akan sampai ke tujuan yang dimaksud. Rumusan Policastro senada dengan McNamara, tetapi sedikit lebih operasional. Policastro menyatakan bahwa kendati setiap orang bisa mempunyai rumusan sendiri, tetapi pada umumnya sepakat bahwa perencanaan strategis merupakan suatu cara untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan mengarahkan sesuatu organisasi ke pencapaian tujuan tersebut. Perencanaan strategis dapat dilakukan untuk lingkup satu organisasi sebagai satu kesatuan menyeluruh, atau lingkup bagian-bagian utama organisasi, tetapi umumnya mencakup lingkup satu organisasi sebagai satu keseluruhan (McNamara, 1999).

Perencanaan strategis terdiri atas beberapa komponen kegiatan utama. Banyaknya komponen dan sebutan untuk komponen kegiatan utama itu dapat bermacam-macam, begitu pula urutan melakukannya. Lebih jauh dari itu, pemaknaan dan operasionalisasinya pun bisa berbeda-beda. McNamara (1999) menganjurkan agar prinsip utama yang seyogyanya dipegang adalah jangan terpaku pada mencari cara terbenar (lebih-lebih konsep dan pengertian terbenar) untuk melakukan perencanaan strategis hanya karena para pakar berbeda pandangan. Jadikan pandangan-pandangan itu hanya sebagai rujukan, bukan aturan main, sebab sekali melangkah menyusun perencanaan strategis (dan selalu cermat dan cerdas belajar daripadanya), mungkin akan ditemukan cara sendiri untuk melakukan perencanaan strategis tersebut, tidak harus sama persis benar dengan yang dirumuskan para pakar.

Komponen kegiatan utama perencanaan strategis menurut McNamara (1999) terdiri atas: (1) *strategic analysis* (analisis/kajian strategik); (2) *setting strategic direction* (penetapan arah-tujuan strategis); dan (3) *action planning* (perencanaan tindakan). Analisis/kajian strategis merupakan kegiatan semacam pencerminan terhadap keadaan lingkungan organisasi. Lingkungan mencakup

lingkungan luar (eksternal) dan lingkungan dalam (internal). Salah satu alat (instrumen) yang sangat populer untuk melakukan analisis strategis adalah analisis SWOT. SWOT merupakan akronim dari *strength* (kekuatan-keunggulan), *weaknesses* (kelemahan-kekurangan), *opportunities* (peluang-kesempatan), dan *threat* (ancaman-rintangan). Kekuatan-keunggulan dan kelemahan-kekurangan merupakan keadaan internal organisasi, sedangkan peluang-kesempatan dan ancaman-tantangan merupakan keadaan eksternal organisasi.

Kekuatan-keunggulan adalah sumber-sumber dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan sebagai basis (modal dasar) untuk mengembangkan keunggulan kompetitif (Quick, 2004). Dalam rumusan lain disebut sebagai sifat keadaan yang memungkinkan organisasi mampu memanfaatkan berbagai peluang dan mengurangi dampak negatif berbagai rintangan. Jelasnya, segala sesuatu yang dimiliki organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri, melakukan kegiatan dan sebagainya. Kelemahan-kekurangan adalah ketiadaan kekuatan-unggulan (Quick, 2004) atau sebagai sifat keadaan yang bisa menghalangi (menyulitkan) untuk bisa memanfaatkan berbagai peluang dan mengurangi dampak negatif berbagai rintangan. Peluang merupakan faktor (keadaan-keadaan) luar yang bisa dimanfaatkan organisasi untuk pengembangan diri (Quick, 2004), sedangkan ancaman-rintangan merupakan faktor-faktor luar yang dapat menghalangi (menyulitkan) kemungkinan organisasi untuk mengembangkan diri.

Komponen kegiatan utama perencanaan strategis lainnya adalah penetapan arah tujuan strategis, yaitu apa yang harus dilakukan terkait dengan berbagai permasalahan (isu-isu) penting dan peluang yang dihadapi yang mencakup berbagai hasil karya (atau tujuan strategis) yang harus dicapai, serta berbagai metode (atau strategi) untuk mencapai hasil karya tersebut (McNamara, 1999). Rumusan tujuan

yang baik mengandung sifat SMARTER yaitu dirumuskan: (1) secara *specific* (khas); (2) *measurable* (terukur atau mudah ditakar); (3) *acceptable* (diterima, disepakati, disetujui, tidak ditolak oleh mereka yang akan melakukan upaya mencapai tujuan dimaksud); (4) *realistic* (sesuai dengan kenyataan-keadaan); (5) *timely* (jelas tegas kurun waktunya); (6) *extending* (sesuai dengan kemampuan mereka yang akan melakukan upaya pencapaian tujuan); dan (7) *rewarding* (memberikan kepuasan-kenyamanan kepada semua pihak).

Komponen kegiatan utama berikutnya adalah perencanaan tindakan (kegiatan). Perencanaan tindakan ini secara cermat menjabarkan bagaimana tujuan-tujuan strategis akan dicapai, yang dinyatakan melalui sasaran-sasaran khusus atau hasil tertentu dari setiap tujuan strategis. Dengan kata lain, dalam rentangan panjang upaya pencapaian tujuan strategis tersebut terjabarkan sederetan mata rantai sasaran-sasaran khusus. Jadi, yang disebut sasaran sebenarnya merupakan tujuan juga, hanya dalam ukuran yang lebih kecil, sempit, atau terbatas (McNamara, 1999). Setiap sasaran kerap kali dikaitkan dengan taktik untuk mencapainya. Taktik merupakan salah satu metode yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Dengan kata lain, taktik merupakan strategi juga, hanya dalam ukuran lebih kecil. Perencanaan tindakan (kegiatan) juga mencakup penetapan tanggung jawab dan batas waktu dari setiap sasaran. Jelasnya penetapan siapa yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan tertentu dan kapan harus dikerjakan. Di dalam perencanaan tindakan juga dinyatakan pula metode untuk memonitor (memantau) dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut yang menegaskan cara bagaimana organisasi bisa mengetahui siapa yang telah melaksanakan kegiatan tertentu dan kapan kegiatan tersebut terlaksana (McNamara, 1999).

Menurut McNamara (1999) lebih lanjut, dalam perencanaan tindakan lazim pula disusun suatu rencana tahunan yang akan

dikerjakan pada tahun mendatang (tahun berikut). Rencana tahunan (*annual plan*) ini ada kalanya disebut sebagai rencana operasional (*operational plan*) atau rencana pelaksanaan kegiatan (*management plan*). Di dalamnya memuat tujuan-tujuan strategis, strategi, sasaran, tanggung jawab dan batas waktu. Kerap kali pula sesuatu organisasi mengembangkan rencana (program) bagi setiap bagian (unit, departemen, seksi) yang ada di dalamnya yang lazim disebut sebagai rencana kerja (*work plans*). Selain itu anggaran (*budget*) biasa dicantumkan dalam rencana strategis, rencana tahunan ataupun rencana kerja. Anggaran menentukan besaran uang yang diperuntukkan bagi sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tahunan. Anggaran menentukan pula bagaimana uang akan dipergunakan, misalnya untuk personil, peralatan, bahan-bahan dan sebagainya.

Proses perencanaan strategis atau manajemen strategis merupakan proses pengarahannya perencanaan strategis dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi formulasi dan implementasi strategi sebagai berikut:

1. Formulasi misi dan tujuan. Pertanyaan mendasar dalam formulasi misi dan tujuan adalah "apa usaha kita?" dan "apa usaha kita yang seharusnya?".
2. Analisis tujuan dan strategi saat ini. Dalam perjalanan waktu manajer suatu organisasi barangkali akan kehilangan minat terhadap misi yang pertama kali mereka perjuangkan. Manajer harus diingatkan kembali pada misi awalnya.
3. Analisis lingkungan. Bertujuan melihat perubahan-perubahan dalam lingkungan, demografis, politik, sosial, ekonomi, yang akan mempengaruhi organisasi. Perubahan dalam lingkungan eksternal organisasi dapat menghasilkan kesempatan maupun ancaman, tergantung bagaimana reaksi organisasi. Untuk memperoleh

informasi perubahan lingkungan, perlu dikembangkan sistem informasi strategis, pengembangan bisnis data, keluhan atau komentar dari pihak luar (pelanggan dan *supplier*).

4. Analisis sumber daya. Dilakukan bersamaan dengan analisis lingkungan, melalui analisis kekuatan dan kelemahan organisasi.
5. Identifikasi kesempatan strategis. Kesempatan strategis merupakan gap antara situasi apabila organisasi menggunakan tujuan dan strategi yang dirumuskan dalam proses penentuan tujuan dengan situasi apabila organisasi menggunakan strategi sekarang ini (tanpa perubahan). Kesempatan strategis muncul apabila organisasi menetapkan tujuan baru yang lebih sulit, atau apabila ada persaingan yang ketat dan mengakibatkan organisasi tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Pengambilan keputusan strategis. Organisasi dapat mengembangkan sejumlah alternatif strategis untuk memanfaatkan kesempatan strategis.
7. Pelaksanaan strategi. Perencanaan strategi harus dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
8. Evaluasi dan pengendalian strategis. Manajer harus selalu mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis. Pengendalian strategis merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana strategis.

Keragaman corak perencanaan yang ada saat ini sesungguhnya menggambarkan perkembangan macam-macam perencanaan antara lain: perencanaan komprehensif (*comprehensive planning*), perencanaan induk (*master planning*), perencanaan strategis (*strategic planning*), perencanaan ekuiti (*equity planning*), perencanaan advokasi (*advocacy planning*), dan perencanaan inkremental (*incremental planning*). Perubahan ini disebabkan oleh paradigma perencanaan yang terjadi pada elit politik terhadap perkembangan zaman yang menyebabkan paradigma *Rational Comprehensive Planning* (RCP)

sudah tidak mampu lagi mengakomodasi tuntutan pembangunan negara dan tuntutan atau kritik terhadap RCP. Oleh karena itu muncul beberapa jenis proses perencanaan.

Perencanaan strategis itu sendiri adalah proses penentuan strategi atau arahan sekaligus pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya. Pendekatan strategis memfokuskan secara efisien pada tujuan yang spesifik, dengan meniru cara perusahaan swasta yang diterapkan pada gaya perencanaan publik tanpa menswastakan kepemilikan publik. Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku dan prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan perlu merancang variasinya sendiri sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi setempat maka banyak sekali terdapat versi perencanaan strategis.

Secara umum perencanaan strategis memuat unsur-unsur: (1) perumusan visi dan misi; (2) pengkajian lingkungan eksternal; (3) pengkajian lingkungan internal; (4) perumusan isu-isu strategis; dan (5) penyusunan strategi pengembangan (yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran). Proses perencanaan strategis tidak bersifat sekuensial penuh, tetapi dapat dimulai dari salah satu dari langkah ke 1, 2, atau 3. Ketiga langkah tersebut saling mengisi. Setelah ketiga langkah pertama ini selesai, barulah dilakukan langkah ke 4, yang disusul langkah yang ke 5. Setelah rencana strategis (renstra) selesai disusun, maka diimplementasikan dengan terlebih dahulu dengan menyusun rencana-rencana kerja (aksi/tindakan).

Sifat-sifat perencanaan strategis antara lain:

1. Lebih berorientasi pada tindakan (*action*). Perencanaan strategis lebih luwes sehingga memungkinkan pengelola pengembangan pemerintahan untuk selalu berpikir dan bertindak strategis menghadapi perubahan-perubahan yang drastis. Visi yang membimbing perencanaan strategis

mencakup pula para pemeran (aktor) pembangunan disamping juga program kegiatan (tindakan) dan ruang (tempat).

2. Lebih menampung partisipasi masyarakat yang lebih luas. Sifat partisipatif ini menjadikan para perencana yang progresif dan membela masyarakat menekankan kebutuhan untuk membawa orang-orang warga masyarakat ke proses perencanaan, yang orang-orang tersebut, karena rancangannya atau praktiknya, tidak pernah berpartisipasi. Partisipasi yang lebih luas akan menghasilkan rencana yang lebih menghayati dan responsif.
3. Lebih mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada. Pertimbangan kekuatan dan kelemahan mendorong organisasi untuk melihat di luar dirinya dalam ruang maupun waktu. Dalam konteks kajian lingkungan, organisasi/perencana dapat mengukur kekuatan dan kelemahan yang relatif terhadap peluang dan ancaman karena peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal dan bersifat harus diterima apa adanya (*given*) dan secara esensial tidak dapat diubah.
4. Lebih menaruh perhatian pada kompetisi kepentingan yang terjadi di masyarakat perkotaan. Kompetisi dalam perencanaan strategis dipandang sebagai bagian yang tidak terelakkan, maka masyarakat diminta untuk mengidentifikasi persaingan dan melakukan antisipasi terhadap ancaman tersebut atau harus menerima konsekuensi akibat mengabaikan persaingan tersebut. Hal tersebut mendorong para perencana juga menyadari persaingan antardaerah, antarnegara, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan lokasi investasi industri dalam menyusun rencana. Perencanaan strategis memang lebih mewadahi partisipasi masyarakat dalam proses perencanannya, sehingga mampu

mewadahi aspirasi partai atau golongan/kelompok yang memperjuangkan demokrasi. Oleh karenanya perencanaan strategis seringkali mempunyai banyak versi dan tidak mempunyai versi baku.

Beberapa hal yang perlu dalam memulai proses perencanaan strategis yang efektif antara lain:

- a. Paling sedikit mempunyai satu sponsor yaitu *stakeholder* yang mempunyai posisi atau wewenang untuk melegitimasi proses perencanaan tersebut.
- b. Paling sedikit satu pendukung kuat untuk mendorong proses agar berjalan terus.
- c. Sebuah tim perencanaan strategis.
- d. Kesadaran bahwa proses mungkin akan mendapat hambatan atau keterlambatan.
- e. Sikap yang fleksibel (luwes) tentang suatu rencana strategis itu.
- f. Kemampuan untuk menggalang informasi dan orang-orang pada waktu-waktu tertentu untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan penting.
- g. Keinginan untuk membangun/menyusun dan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan kriteria evaluasi (meskipun sangat berbeda).

C. Manajemen Strategi

Apabila perencanaan strategi yang diinginkan agar berfungsi secara operasional, maka perlu ditempuh langkah-langkah tertentu untuk menerapkannya. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Mengkomunikasikan strategi kepada semua manajer pengambil keputusan. Tentu tidak akan banyak manfaat menyusun strategi yang bermakna apabila strategi itu tidak dikomunikasikan kepada semua manajer yang menduduki posisi pengambilan keputusan

program dan rencana yang dirancang untuk ditetapkan. Tidak ada yang dikomunikasikan kecuali hal-hal yang akan disampaikan itu jelas bagi para penerimanya. Strategi itu mungkin jelas bagi komisi eksekutif dan kepala eksekutif yang ikut serta dalam penyusunannya, tetapi strategi itu perlu dituangkan secara tertulis dan perlu diadakan pertemuan secukupnya yang diselenggarakan oleh para eksekutif puncak dan bawahan mereka untuk memastikan bahwa strategi itu dipahami oleh mereka yang mengambil keputusan untuk menerapkannya.

2. Menyusun dan mengkomunikasikan premis perencanaan. Premis-premis yang penting bagi perencanaan dan keputusan harus disusun dan dijelaskan kepada semua manajer dengan instruksi untuk melahirkan program-program dan mengambil keputusan sejalan dengan premis itu. Terlalu sedikit organisasi lainnya yang melakukan hal ini, tetapi apabila hal ini tidak dilakukan dan apabila premis itu tidak mencakup asumsi-asumsi pokok tentang keseluruhan lapisan lingkungan dimana rencana akan tetap dilaksanakan maka kemungkinan besar keputusan akan didasarkan atas asumsi dan perkiraan pribadi. Hasilnya hampir pasti yaitu suatu kumpulan rencana yang tidak terkoordinasi.
3. Memastikan bahwa rencana tindakan berkontribusi dan mencerminkan tujuan dan strategi utama. Rencana tindakan (*action plan*) adalah program-program dan keputusan taktis operasional, entah bersifat pokok atau tambahan, yang berlangsung dalam berbagai organisasi. Apabila rencana tindakan tidak disusun untuk mencerminkan tujuan dan strategi maka hasilnya adalah harapan-harapan kabur atau pernyataan yang tidak ada gunanya. Apabila hal ini tidak diperhatikan benar maka perencanaan strategi tentunya tidak akan memiliki dampak sampai ke lini bawah. Terdapat berbagai cara untuk memastikan bahwa rencana tindakan memang memberi kontribusi nyata. Apabila setiap manajer memahami

strategi maka ia pasti meninjau ulang rekomendasi program yang datang dari staf dan bawahan lini untuk melihat kontribusi dan konsistensinya. Bahkan akan lebih baik, paling tidak dalam keputusan-keputusan penting untuk membentuk panitia kecil agar meninjau ulang rencana tindakan yang telah disusun yaitu panitia yang mencakup atasan dari bawahan, atasan dari atasan spesialisasi staf. Hal ini akan mewujudkan pancaran formalitas dalam keputusan program yang diambil dan pengaruh penting pada penerapan strateginya akan menjadi lebih jelas. Demikian juga anggaran perlu ditinjau ulang berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Meninjau strategi secara teratur. Biarpun strategi telah disusun secara seksama, mungkin tidak akan berfungsi dengan baik apabila terjadi perubahan, informasi menjadi lebih jelas, atau lingkungan program tampaknya tidak lagi seperti yang diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian strategi perlu ditinjau dari waktu ke waktu, paling sedikit dalam setahun bagi strategi-strategi yang utama dan mungkin lebih sering lagi.
5. Mempertimbangkan penyusunan strategi dan program kontingensi. Apabila perubahan yang cukup penting terjadi dalam faktor-faktor kompetitif atau unsur-unsur penting dalam lingkungan dan tampaknya tidak praktis menyusun satu perangkat strategi dan program saja untuk meliputi segala kemungkinan seperti itu, maka perlu disusun strategi untuk kemungkinan tersebut. Tentu saja tidak seorangpun harus menunggu kepastian di masa depan untuk menyusun rencana. Bahkan biarpun telah ada kepastian dan mungkin terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat perangkat tujuan, strategi atau program tertentu menjadi tidak terpakai lagi, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali terus bergerak maju atas dasar perangkat premis yang paling dipercaya. Tetapi hal ini tidak

berarti bahwa kita perlu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

6. Menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan perencanaan. Struktur organisasi dengan sistem pendelegasian perlu dirancang sedemikian rupa untuk mendukung pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan bagi penerapan strategi. Apabila diterapkan, cara terbaik adalah menentukan seseorang untuk bertanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain bidang-bidang hasil akhir dan gugus tugas yang penting perlu diidentifikasi dan dibebankan pada posisi sejauh mungkin ke tingkat bawah dari struktur organisasi. Karena dalam hal ini tidak dapat dilakukan, mungkin tidak ada alternatif lain kecuali memanfaatkan bentuk organisasi.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Batang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja didasarkan atas kebutuhan Pemerintah Kabupaten Batang. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, bahwa potensi-potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Batang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan strategi yang efektif untuk penguatan ekonomi lokal di Kabupaten Batang.

B. Sasaran Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sasaran dalam penelitian ini adalah:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok terkait dengan perencanaan pembangunan terutama pembangunan ekonomi.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok pemberdayaan masyarakat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok mengelola UMKM.
4. Obyek-obyek potensi ekonomi lokal Kabupaten Batang.
5. *Stakeholders*.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. *Desk Study*. Metode ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan *literature* dan peraturan perundangan yang relevan.

- b. Melakukan diskusi dan pembahasan hasil pengumpulan *literature* dan peraturan perundangan dengan para pakar.
2. Metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menghitung potensi riil ekonomi lokal Kabupaten Batang.
3. Metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperdalam serta menganalisis data dan informasi yang bersifat kualitatif yang diberikan oleh informan terutama berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam menguatkan ekonomi lokal.

D. Fokus Penelitian

Untuk menjawab dan mengkaji masalah penelitian, penentuan fokus penelitian menjadi sangat perlu. Tanpa fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperolehnya dari lapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian sangat penting peranannya dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Sesuai dengan permasalahan penelitian yang diajukan, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Potensi ekonomi lokal Kabupaten Batang.
2. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Batang dalam penguatan ekonomi lokal.
3. Strategi penguatan ekonomi lokal Kabupaten Batang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data yang dibutuhkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati dan menghitung potensi ekonomi lokal Kabupaten Batang.
2. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan data-data yang bersifat kualitatif yakni data tentang kekuatan, kelemahan, peluang

dan ancaman yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Batang dalam menguatkan ekonomi lokal.

3. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen, peraturan perundangan, arsip dan berbagai laporan yang relevan dengan tujuan penelitian.
4. *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada persoalan yang meminta tanggapan kelompok. Sesuai dengan fungsi FGD tersebut, maka penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap bersama narasumber terhadap isu-isu strategi penguatan ekonomi lokal Kabupaten Batang.

F. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dapat dirinci berdasarkan jenis datanya yakni:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan FGD.
2. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari dokumentasi.

Dalam penelitian ini meskipun ada dua macam data yakni kualitatif dan kuantitatif, namun data kuantitatif merupakan hasil observasi, oleh karena itu teknik validitas data hanya digunakan satu teknik yaitu triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang didapatkan. Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi metode. Triangulasi metode ini merupakan teknik yang melakukan pengecekan dan pembandingan keabsahan data melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, data hasil observasi dengan data hasil FGD, antara data hasil observasi dengan data dari dokumentasi,

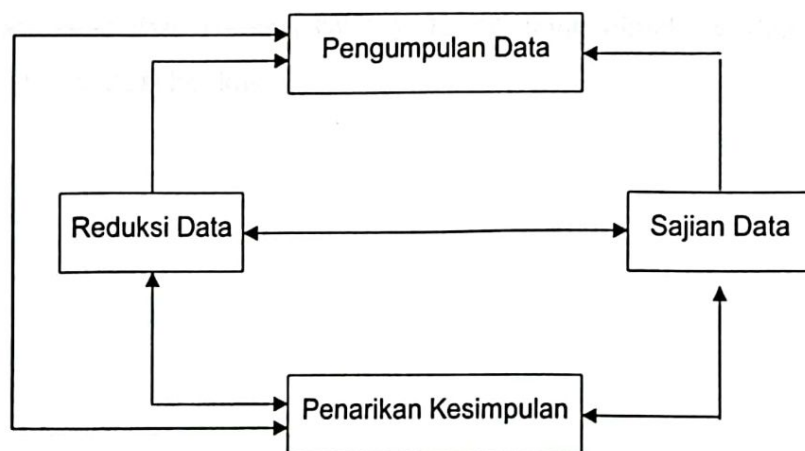
antara data hasil wawancara dengan data hasil FGD, antara data hasil wawancara dengan data dokumentasi dan antara data hasil FGD dengan data dari dokumentasi.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini ada dua macam data yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk menganalisis kedua macam data tersebut akan digunakan tiga macam teknik yakni:

1. Model analisis interaktif

Dalam model ini tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang semuanya dilakukan dalam bentuk interaktif, dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Setelah data terkumpul dalam bentuk sajian data, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data, karena data yang didapatkan para *interviewer* ternyata begitu banyak dan tidak semuanya relevan dengan permasalahan. Setelah data direduksi langkah verifikasi dapat dilakukan. Langkah-langkah ini dilakukan berulang-ulang seperti siklus dan baru dihentikan apabila telah terjadi pengulangan dari data yang diperoleh sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, proses analisis dengan model interaktif ini disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : Miles dan Huberman (1984:120)

Menurut Miles dan Huberman (1984:120), tiga komponen tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam *fieldnote*, berlangsung terus selama pelaksanaan riset dimulai sebelum pengumpulan data dilakukan.
- b. Sajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Peneliti akan tahu apa yang terjadi dan memungkinkan sesuatu untuk dikerjakan berdasarkan pengertian tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah peneliti harus mengerti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi.

2. Analisis SWOT

Untuk mendapatkan sebuah strategi yang efektif penguatan ekonomi lokal, maka digunakan analisis *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities* dan *Treats* (SWOT). Teknik yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

<p><i>Strengths</i> <i>Weaknesses</i></p> <p><i>Opportunities</i> <i>Threats</i></p>	<p><i>Strengths</i> (S) Tentukan faktor-kekuatan internal</p>	<p><i>Weaknesses</i> (W) Tentukan faktor-faktor kelemahan</p>
<p><i>Opportunities</i> (O) Tentukan faktor-faktor peluang eksternal</p>	<p>Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p>	<p>Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p>
<p><i>Threats</i> (T) Tentukan faktor-ancaman eksternal</p>	<p>Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p>	<p>Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</p>

Analisis tersebut secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kekuatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG

A. Kondisi Geografis Dan Wilayah

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak antara 6° 51' 46" dan 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" dan 110° 03' 06" Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Batang terutama Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah utara, dimana arus mobilitas yang tinggi di jalur pantura menjadikan wilayah ini berkembang prospektif dalam sektor jasa transit serta transportasi. Luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 78.864,16 Ha. Secara administratif, Kabupaten Batang berbatasan dengan beberapa wilayah seperti berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Kendal

Sebelah Selatan: Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara

Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan

Adapun jarak ibu kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah-daerah lain diantaranya Pekalongan (9 km), Pemasang (43 km), Tegal (72 km), Brebes (85 km), Cirebon (144 km), Jakarta (392 km), Kendal (64 km), Semarang (93 km), Surabaya (480 km).

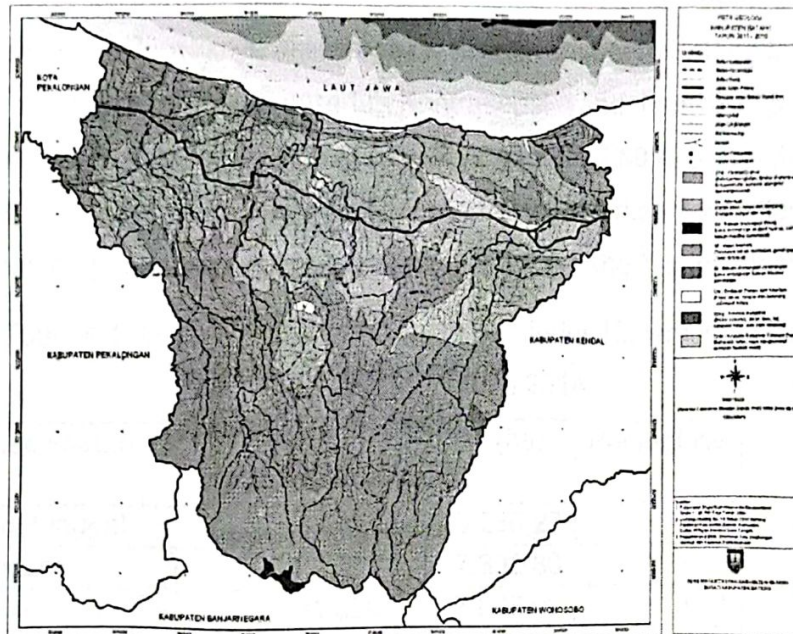
Topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas bagian pantai, dataran rendah dan pegunungan. Kondisi wilayah yang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan memiliki potensi untuk dikembangkan pembangunan agroindustri, agrowisata serta agrobisnis. Terdapat lima gunung di Kabupaten Batang meliputi Gunung Prau (2.565 dpal), Gunung Sipandu (2.241 dpal), Gunung Gajah Mungkur (2.101 dpal), Gunung Alang (2.239 dpal), Gunung

Butak (2.222 dpal). Wilayah sebelah selatan yang bercorak pegunungan sangat potensial dikembangkan menjadi wilayah wisata alam, pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti teh, kopi, coklat dan sayuran.

Sebagian besar pegunungan di Kabupaten Batang memiliki susunan tanah latosol 69,66%, andosol 13,23%, alluvial 11,47% dan podsolik 5,64% sehingga mempengaruhi pemanfaatan tanah sebagian besar untuk budidaya hutan, perkebunan serta pertanian. Penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas dikelola oleh negara, sedangkan pertanian kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dikelola warga. Komponen penting dalam distribusi sumberdaya air adalah sarana sungai. Dalam hal ini pemanfaatan sumberdaya air akan mengandalkan sungai agar dapat mencapai tujuan pemanfaatannya. Kabupaten Batang memiliki beberapa sungai yang melintasi wilayah administrasi diantaranya sungai Kupang, Gabus, Lojahan, Sambong, Sono, Karanggeneng, Tinap, Kitiran, Boyo, Urang, Langsean, Dung Uling, Petung, Arus, Terju, Belo, Kuto, dan Lampir.

Secara klimatologi, Kabupaten Batang memiliki tipe iklim tropis dengan jumlah hari hujan pada Bulan Oktober-April dan musim kemarau pada Bulan April-Oktober, dimana kedua musim ini silih berganti sepanjang tahun. Curah hujan terbanyak pada Kabupaten Batang terletak di Kecamatan Blado, kemudian curah hujan paling sedikit di Kecamatan Gringsing, sedangkan curah hujan tertinggi di Kecamatan Reban dan yang paling rendah di Kecamatan Tulis. Suhu Kabupaten Batang berkisar antara 25°C - 32°C, disertai kelembabannya berkisar antara 55% - 91%. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima

belas) kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan. Berikut ini akan dipaparkan gambar peta geologi dari Kabupaten Batang:



Gambar 4.1. Peta Geologi Kabupaten Batang 2012-2017

B. Demografi dan Sosial

Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2014 tercatat sejumlah 722.026 jiwa, yang terdiri dari 361.054 jiwa penduduk laki-laki dan 360.971 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 100,02. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan meliputi 239 desa, 9 kelurahan, 1.096 dukuh, 3.959 Rukun Tetangga (RT) serta 1.066 Rukun Warga (RW). Jumlah rumah tangga di Kabupaten Batang sebanyak 169.165. Rata-rata besarnya anggota rumah tangga sebesar 4,3 orang, sedangkan kepadatan penduduknya tercatat sebesar 916 jiwa per km².

Jumlah kelahiran selama tahun 2014 sebanyak 4.043 jiwa sedangkan jumlah kematian selama periode tersebut sebanyak 2.061 jiwa. Tingkat pertambahan penduduk alamiah selama tahun 2014 sebesar 2,77. Banyaknya akseptor aktif KB di Kabupaten Batang tahun 2014 sebanyak 129.060 peserta. Kontrasepsi yang banyak dipakai adalah suntik sebesar 55,71%, pil 19,99%, implant 7,60%, IUD 5,52%, MO 7,91% dan kondom 3,27%. Berikut akan dipaparkan luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan di Kabupaten Batang Tahun 2014:

Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Batang Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (ha)	Persentase
1.	Wonotunggal	34.017	5.235,27	6,64
2.	Bandar	63.459	7.332,80	9,30
3.	Blado	41.826	7.838,92	9,94
4.	Reban	37.548	4.633,38	5,88
5.	Bawang	51.512	7.384,51	9,36
6.	Tersono	37.137	4.932,98	6,26
7.	Gringsing	56.166	7.276,64	9,23
8.	Limpung	41.756	3.341,66	4,24
9	Banyuputih	34.086	4.442,50	5,63
10.	Subah	48.103	8.352,17	10,59
11.	Pecalungan	30.518	3.618,97	4,59
12.	Tulis	35.710	4.508,78	5,72
13.	Kandeman	47.533	4.175,67	5,29
14.	Batang	114.058	3.434,54	4,36
15.	Warungasem	48.597	2.355,38	2,99
Jumlah		722.026	78.864,16	100,00

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel tersebut, maka jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Batang tahun 2014 adalah Kecamatan Batang sebesar 114.058 orang, kemudian jumlah penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Pecalungan 30.518 orang. kecamatan Subah merupakan wilayah terluas di Kabupaten Batang sebesar 8.352,17 ha, sedangkan

Kecamatan Warungasem termasuk wilayah terkecil dengan luas wilayah 2.355,38 ha.

Persentase penduduk Kabupaten Batang tahun 2014 berumur 5 tahun keatas dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan terdapat 30,72% penduduk yang tidak/ belum tamat SD, tamat SD 41,32%, 16,14% tamat SMP dan 8,85% tamat SMA serta 2,98% tamat Diploma (I,II,III & IV), Akademi dan Perguruan Tinggi. Banyaknya sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batang diantaranya, Taman Kanak-kanak (TK) 246 buah, Sekolah Dasar (SD) 456 buah, SMP 66 buah dan SMA/SMK 37 buah. Banyaknya sekolah untuk lingkungan Departemen Agama terdapat RA/BA sebanyak 118 buah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 119 buah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 32 buah, Madrasah Aliyah (MA) 12 buah dan Madrasah Diniyah 648 buah.

Sarana kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2014 jumlah sarana kesehatan Kabupaten Batang terdiri dari Puskesmas 21 buah, Puskesmas Pembantu 41 buah, Balai Pengobatan Umum 11 buah dan Rumah Sakit Umum 2 buah. Jumlah tenaga kesehatan yang terdapat pada RSUD Kabupaten Batang sebanyak 624 orang meliputi 19 dokter spesialis, 17 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi, 252 orang perawat dan selebihnya adalah tenaga apoteker, analis, non kesehatan dan lain-lain.

Banyaknya tempat peribadatan di Kabupaten Batang pada tahun 2014 mencapai 3.750 buah yang terdiri dari 788 Masjid, 2.938 Musholla, 23 buah Gereja, dan 1 Vihara. Sedangkan banyaknya pemeluk agama di Kabupaten Batang sebanyak 99,57% beragama Islam, 0,18% beragama Katolik, 0,23% beragama Protestan serta 0,01 % beragama Budha dan 0,01% Hindu. Kondisi tersebut mencerminkan adanya keberagaman tempat peribadatan merupakan salah satu bukti kerukunan antar umat beragama. Suasana kerukunan kehidupan

beragama tentu sangat lah didambakan setiap masyarakat, khususnya Kabupaten Batang.

Sektor pertanian Kabupaten Batang pada tahun 2014 masih menjadi pilihan prioritas tenaga kerja masyarakat Batang, terbukti sebanyak 34,10% penduduknya bekerja pada sektor ini pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertanian lainnya. Adapun sektor selain pertanian yang banyak diminati adalah sektor perdagangan sebesar 12,64% serta sektor industri sebesar 15,72%. Selanjutnya, persentase pencari kerja yang ada di Kabupaten Batang 70,81% adalah lulusan SLTA, kemudian lulusan SMP 14,21%, lulusan SD 4,52%. Sarjana muda di Kabupaten Batang berjumlah sebesar 3,68% dan lulusan Sarjana sebesar 6,78%. Dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercatat 69,36% berumur 20-55 tahun, sisanya 30,64% berumur 10-19 tahun.

C. Kondisi Makro Ekonomi

Posisi wilayah Kabupaten Batang berada pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Kondisi Kabupaten Batang yang menjadi jalur lintas angkutan darat membuat keberadaan terminal bus/truk menjadi sangat penting. Terminal bus yang relatif ramai disinggahi bus antar kota adalah Terminal Banyuputih dan Terminal Limpung, sedangkan bus antar kota-antar provinsi sebagian besar singgah di rumah makan/restaurant di daerah Kecamatan Gringsing. Kemudian untuk terminal angkutan barang/truk berada di wilayah Banyuputih dan Timbang. Terdapat banyak industri tekstil di wilayah Kabupaten Batang, dari skala rumah tangga sampai industri berorientasi ekspor, antara lain PT Primatex dan PT Saritex.

Wilayah Kabupaten Batang sangat strategis dari sisi ekonomi karena dilewati oleh jalur perdagangan nasional serta jalan pantura.

Wilayahnya yang memiliki garis pantai yang terhitung panjang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan maupun pelabuhan kargo untuk barang-barang hasil produksi industri setempat. Pasokan listrik di wilayah Batang juga dapat diandalkan, karena dilewati oleh jaringan SUTET milik PT PLN (persero). Di beberapa wilayah juga memiliki potensi energi hidro yang dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Wilayah Batang tidak memiliki sejarah bencana geologi, kemudian adanya sumber daya manusia yang melimpah akan menguntungkan bagi investor yang hendak membangun industri di wilayah ini. Kondisi sebagaimana diuraikan di atas sangat mempengaruhi struktur perekonomian di Kabupaten Batang. Struktur perekonomian di Kabupaten Batang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten.

Pada tahun 2014 laju inflasi kumulatif Kabupaten Batang sebesar 8,08 %. Besarnya angka inflasi dipengaruhi oleh perubahan harga menurut kelompok barang. Secara umum naiknya indeks harga masing-masing kelompok barang pada tahun 2013 lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya. Angka inflasi tertinggi pada tahun ini terutama terjadi pada kelompok transportasi & komunikasi; bahan Makanan; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau masing-masing sebesar 13,75%, 11,93%, 7,10% Sedangkan kenaikan indeks terendah tercatat pada kelompok sandang sebesar 0,73% persen.

BAB V. ANALISIS HASIL KAJIAN

A. Sinkronisasi Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Isu strategis merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab isu strategis memiliki dampak bagi entitas dalam hal ini adalah daerah/masyarakat di masa datang, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan. Isu strategis harus diidentifikasi sebelum disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui proses berjenjang dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka waktu 5 tahun.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Batang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2012 – 2017 adalah "Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan memperlancar kesejahteraan masyarakat Batang". Visi tersebut sejalan dengan visi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Batang 2005 – 2025, yakni "Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan". Visi yang telah ditetapkan di atas mengandung pengertian bahwa pemerintahan Kabupaten Batang harus bisa bekerja secara efektif, bersih dan profesional sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang sejahtera.

Permasalahan pokok pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Batang pada tahun 2012 sampai dengan 2017 secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang permasalahan yaitu permasalahan penataan dan pembinaan birokrasi, permasalahan

iklim investasi yang berkorelasi pada pengembangan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah, permasalahan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan permasalahan kualitas sumber daya masyarakat dalam pembangunan.

Isu strategis iklim investasi yang berkorelasi pada pengembangan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah, antara lain adalah:

1. Peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan peran Koperasi dan UKM dalam usaha perdagangan, dan orientasi kebijakan industri yang *pro growth, pro poor, pro job* dan *pro environment*.
2. Peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan berbasis pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Misi merupakan rumusan hal-hal yang diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Rumusan misi dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 ini merupakan penjabaran atas visi "Terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang". Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.
2. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Misi tersebut juga sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berkari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pengembangan ekonomi lokal daerah merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2017 dalam mewujudkan misi ke-2, yaitu "Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah". Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang tahun 2012 – 2017 disebutkan bahwa tujuan misi ke-2, yaitu:

1. Mengembangkan perekonomian daerah dan peningkatan investasi daerah yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya penanaman modal di daerah
 - b. Meningkatnya penyerapan kerja diberbagai sektor
2. Pengembangan perdagangan dan industri yang berwawasan lingkungan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional
 - b. Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan
3. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan mewujudkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian
 - b. Terehabilitasinya lahan hutan yang kritis
 - c. Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan
4. Meningkatkan perekonomian berbasis masyarakat melalui koperasi dan sektor kebudayaan dan pariwisata, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM
 - b. Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal

B. Potensi Ekonomi Lokal Kabupaten Batang

1. Potensi Sumberdaya Alam
 - a. Geologi (Perubahan areal pemanfaatan tanah sangat stagnan, walaupun Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi. Lebih kurang 60% diusahakan sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati,

kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya).

- b. Penggunaan lahan (Kabupaten Batang memiliki luas wilayah mencapai 78.864,16 Ha. Luas pemanfaatan lahan pada tahun 2012 terdiri dari 22.433,13 Ha (28,44%) lahan sawah dan 56.431,03 Ha (71,55%) lahan bukan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana (41,95%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,51%), sisanya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan).

2. Potensi Daerah

a. Potensi pertanian

Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Batang. Luas pemanfaatan lahan pada tahun 2012 terdiri dari 22.433,13 Ha (28,44%) lahan sawah dan 56.431,03 Ha (71,55%) lahan bukan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana (41,95%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,51%), sisanya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan. Sedangkan lahan bukan sawah digunakan untuk tegal/ huma sebesar 37,52% yang merupakan presentase penggunaan terbesar, kemudian digunakan untuk bangunan/pekarangan, perkebunan, hutan negara, tambak/kolam dan padang rumput.

Potensi sumber daya alam di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis tanaman sayur-sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang daun, kentang, kubis dan cabe. Sedangkan untuk buah-buahan adalah durian, rambutan, nangka, mangga, jeruk dan pisang. Untuk jenis

tanaman perkebunan adalah kelapa, tebu, teh, coklat, kopi dan cengkeh.

b. Potensi perikanan

Kabupaten Batang yang sebagian wilayahnya terletak di tepi pantai Laut Jawa yang didukung dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupa tambak (air payau) dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, budidaya air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air). Jenis-jenis ikan hasil penangkapan ikan di laut yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan mata besar, ikan remang, ikan bambangan/kakap merah dan ikan bawal. Sedangkan untuk jenis perikanan budidaya adalah udang windu, vanamae, udang putih, ikan bandeng serta ikan lele.

Potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan saat ini belum dapat tergarap secara optimal, hal ini dapat dilihat dari belum dapat dimanfaatkannya wilayah laut seluas 249,395 km². Untuk perikanan budidaya dari potensi lahan air payau seluas 1.429,2 Ha baru dimanfaatkan seluas 292,6 Ha. Sedangkan potensi lahan budidaya air tawar seluas 300 Ha, baru dimanfaatkan seluas 167 Ha. Dengan melihat kondisi tersebut diatas, maka sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan.

c. Potensi wisata

Keindahan alam Kabupaten Batang merupakan aset daerah yang sangat berharga dan merupakan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Beberapa obyek wisata di Kabupaten Batang yang saat ini cukup menonjol

adalah Pantai Sigandu, Pantai Ujung Negro, Kolam Renang Bandar, Curug Genting dan Curug Gombong. Sedangkan untuk jenis agrowisata adalah Agrowisata Perkebunan Teh Pagilaran dan Agrowisata Salak Sodong, sedangkan untuk jenis wisata boga adalah madu, emping, kerupuk kulit ikan, keripik nangka, keripik pisang, buah durian, rambutan, pisang tanduk serta salak.

Kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya tarik wisata di Kabupaten Batang antara lain:

a) Kirab Budaya

Kirab budaya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka peringatan hari jadi Pemerintah Kabupaten Batang. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan mengenalkan dan melestarikan berbagai jenis budaya dan kesenian yang ada di Kabupaten Batang. Dengan dikenalnya kesenian dan kebudayaan yang ada diharapkan akan meningkatkan karakter masyarakat dan bangga dengan kearifan lokal yang ada. Dalam kirab budaya ini diikuti oleh segenap lapisan masyarakat dan lembaga swasta dan negeri, dengan menampilkan berbagai seni dan budaya di Kecamatan masing-masing, mobil hias, marching band dan lainnya dengan peserta dari para pelajar SMA, SMP, SD para kepala desa di wilayah kabupaten Batang. Sepanjang rute yang dilalui para peserta kirab budaya menunjukkan berbagai atraksinya dihadapan ribuan masyarakat yang sangat antusias menyaksikan Kirab Budaya tersebut.

Tema kirab budaya berganti di tiap penyelenggaraan. Diawali dengan tema Batang Batik Carnival pada tahun 2012, 1001 Bunga Carnival pada tahun 2013 dan Batang Maritim Carnival pada tahun 2014. Melalui kirab budaya ini

diharapkan akan lebih mengenalkan budaya dan kesenian Kabupaten Batang ke tingkat nasional dan menambah kunjungan wisatawan yang datang.

b) Lomba

Lomba adalah kegiatan pesta nelayan yang berupa lomba perahu, sebagai tradisi para nelayan Kabupaten Batang yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan tanggal 1 Syawal di Sungai Sambong Desa Klidang Lor Kecamatan Batang. Kegiatan tersebut adalah merupakan perwujudan rasa syukur atas kemenangannya dalam menjalankan ibadah puasa.

c) Malam Jum'at Kliwonan

Malam Jum'at Kliwonan adalah merupakan arena keramaian berupa pasar malam dimana banyak penjual / pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Disamping itu para pengunjung juga dapat membeli berbagai makanan khas Batang dan menikmati pagelaran kesenian tradisional.

d) Kesenian Daerah

Berbagai kesenian daerah yang menjadi daya dukung wisata diantaranya kesenian lengger, kuntulan dan dengklung.

d. Potensi hutan

Kabupaten Batang memiliki kawasan hutan negara seluas 20.796,95 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi 15.316,51 Ha, kawasan hutan lindung 3.050,45 ha, kawasan hutan konservasi 93,89 Ha dan kawasan lindung 2.416,87 Ha. Selain itu, masih terdapat hutan rakyat seluas kurang lebih 10.771,44 Ha yang tersebar di 15 Kecamatan. Hutan ini menghasilkan berbagai jenis kayu seperti sengon, jati, dan pinus. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di Kabupaten

Batang digunakan untuk bahan baku mebel, pertukangan, bak truk, galangan kapal, kayu bakar, sedangkan limbah kayu digunakan untuk kerajinan tangan. Adapun kayu bulat (log) maupun kayu setengah jadi dijual keluar daerah bahkan untuk jenis kayu jati diekspor ke Jepang. Disamping hasil hutan berupa kayu, dikembangkan pula budidaya aneka usaha kehutanan (non kayu) yaitu berupa budi daya lebah madu, sarang burung wallet, persuteraan alam dan kebun bibit desa.

e. Potensi industri dan perdagangan

Banyaknya hasil sumber daya alam di Kabupaten Batang baik hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan sumber daya air yang cukup melimpah, sangat potensial bagi perkembangan industri dan perdagangan. Adapun jenis-jenis industri yang ada dan potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Batang adalah:

- 1) Kerajinan kulit
- 2) Pembuatan keripik buah pisang dan buah nangka
- 3) Pengolahan ikan
- 4) Emping melinjo
- 5) Pembuatan bak truk
- 6) Galangan kapal
- 7) Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
- 8) Tepung Tapioka
- 9) Madu lebah
- 10) Batik
- 11) Usaha konveksi

3. Pendapatan Domestik Regional Bruto

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sumbangan lapangan usaha di sektor industri pengolahan pada tahun 2015 memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) seri 2010 atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar Rp

5.361.274,29 (33,43 persen). Kemudian disusul pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 3.849.248,39 (24,02).

Tabel 5.1. Sumbangan Lapangan Usaha terhadap PDRB Tahun 2010 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Batang (juta rupiah) Tahun 2015

No	Lapangan Usaha	Sumbangan terhadap PDRB	
		(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan	3.849.148,39	24,0
B	Pertambangan dan Penggalian	439.548,93	2,48
C	Industri Pengolahan	5.361.274,29	33,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.820,34	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelola-an	14.746,33	0,10
F	Konstruksi	770.888,89	4,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.038.532,0 7	12,9 9
H	Transportasi dan Pergudangan	376.586,82	2,34
I	Penyediaan Akomodasi dan	590.409,99	3,60
J	Informasi dan Komunikasi	369.198,93	2,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	276.031,51	1,72
L	Real Estate	165.617,38	1,04
M,N	Jasa Perusahaan	56.977,50	0,34
O	Administrasi Pemerintah-an, Pertahanan dan Jaminan Sosial	421.370,45	2,62
P	Jasa Pendidikan	906.603,78	5,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	112.678,87	0,71
R,S,T,	Jasa Lainnya	281.305,31	1,82
	PDRB	16.040.754,7	

C. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Tantangan

1. Kekuatan

- 1) Ibu Kota Kabupaten Batang berada pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi

di jalur pantura menjadikan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

- 2) Tersedianya lahan yang memadai untuk pengembangan pertanian, perikanan dan perkebunan yang memiliki aksesibilitas distribusi yang mudah.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya alam seperti kontur daerah yang beragam yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi daerah.
- 4) Kuantitas sumberdaya aparatur daerah cukup memadai serta memiliki kompetensi yang cukup baik.
- 5) Memiliki potensi wisata alam, wisata sejarah dan wisata khusus.
- 6) Kearifan lokal masyarakat yang terjaga baik yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata khusus yang memiliki pasar tersendiri.
- 7) Penduduk usia produktif cukup tinggi.

2. Kelemahan

- 1) Kondisi geografis daerah berbukit dan sebagian besar berada kawasan hutan relatif tingginya tingkat kemiskinan.
- 2) Belum optimalnya peran sumber pembiayaan seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mendukung ekonomi kerakyatan dan pasar komoditi unggulan sektor pertanian/perkebunan karena belum ada regulasi yang mengatur.
- 3) Rendahnya kualitas SDM masyarakat.
- 4) Sektor industri swasta belum memberikan kontribusi yang riil terhadap perekonomian Kabupaten Batang karena belum ada regulasi yang mengatur.
- 5) Sumber-sumber keuangan daerah yang terbatas.
- 6) Rendahnya kesadaran pengusaha dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- 7) Belum berkembangnya teknologi tepat guna.

3. Peluang

- 1) Semakin baik dan berkembangnya pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Tingginya minat investor dalam menanamkan modal karena terbukanya iklim dunia usaha kondusif.
- 3) Semakin luasnya potensi pasar wisata dan komoditas serta sektor riil.
- 4) Peran riil UMKM dalam pengembangan ekonomi daerah.
- 5) Tumbuh dan berkembangnya pariwisata antar daerah.
- 6) Exit tol di batang yang berpeluang memperlancar distribusi barang/jasa dari dan menuju Kabupaten Batang.
- 7) Semakin berkembangnya IPTEKS.
- 8) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang menunjang pengembangan potensi ekonomi daerah.

4. Ancaman

- 1) Meningkatnya persaingan ekonomi antar daerah.
- 2) Semakin parahnya kerusakan lingkungan.
- 3) Pembangunan jalan tol yang berpotensi menurunkan pendapatan UMKM di jalur pantura.
- 4) Adanya potensi bencana.
- 5) Pengaruh budaya negatif terhadap tataran kehidupan agama, adat dan sosial budaya.
- 6) Adanya kebijakan pemerintah yang kontraproduktif satu sama lainnya.

D. Strategi Penguatan Ekonomi Lokal

Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses pembangunan ekonomi dimana *stakeholders endogeneous* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang berperan aktif dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Prinsip penerapannya adalah kerjasama *stakeholders* yang akan sangat menentukan keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal (Blakely, 1984 dalam Supriyadi, 2007).

Berdasarkan fokus penerapannya, tujuan PEL meliputi:

1. Membentuk jaringan kerja kemitraan antara pelaku ekonomi untuk pemanfaatan potensi lokal dengan meningkatkan kapasitas pasar pada tingkat lokal, regional dan global.
2. Meningkatkan kapasitas lembaga lokal (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaan PEL.
3. Terjadinya kolaborasi antar aktor baik publik, bisnis dan masyarakat
4. Secara kolektif akan mendorong kondisi yang nyaman dalam pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga berkurangnya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan serta mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Dalam proses implementasi perencanaan dan penerapan PEL ini menggunakan prinsip pendekatan ekonomi, kemitraan, dan kelembagaan.

1. Prinsip ekonomi

- 1) Mulai dengan kebutuhan pasar
- 2) Menfokuskan pada kluster dari kegiatan ekonomi yang ada, yang produksinya dijual ke daerah luar (*economic base*) dan *multiplier effect* di daerahnya kuat
- 3) Menghubungkan produsen skala kecil dengan *supplier* kepada perusahaan ekspor.

2. Prinsip Kemitraan

- 1) Adanya tanggung jawab dari masing-masing *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sebagai aktor pengembang dan pengelola ekonomi lokal

- 2) Masing-masing *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) berperan aktif dalam bekerjasama
- 3) Kemitraan mengandalkan sumber daya lokal, bukan bantuan dari luar atau asing
- 4) Inisiatif digerakkan oleh pembeli, pasar, dan permintaan bukan produksi atau *supply*.

3. Prinsip Kelembagaan

- 1) Fasilitas dialog diantara *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk menghasilkan ide dan inisiatif
- 2) Mobilisasi sumber daya lokal untuk menunjang inisiatif yang diusulkan
- 3) Pengembangan kelembagaan didasarkan atas kebutuhan dari kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung

Ketiga prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai strategi pendekatan dan proses perencanaan mengembangkan ekonomi lokal yang dilakukan atas dasar partisipasi dan kemitraan dalam kerangka pengembangan kelembagaan. Partisipasi dalam konteks pemerintah diartikan sebagai forum yang terorganisasikan guna memfasilitasi komunikasi antar pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* dan berbagi kelompok yang berkepentingan terhadap penanganan masalah atau pengambilan keputusan. Partisipasi dan kemitraan antar pelaku dalam PEL berkaitan erat dengan prinsip keterbukaan, pemberdayaan, efisiensi, dan *good governance*.

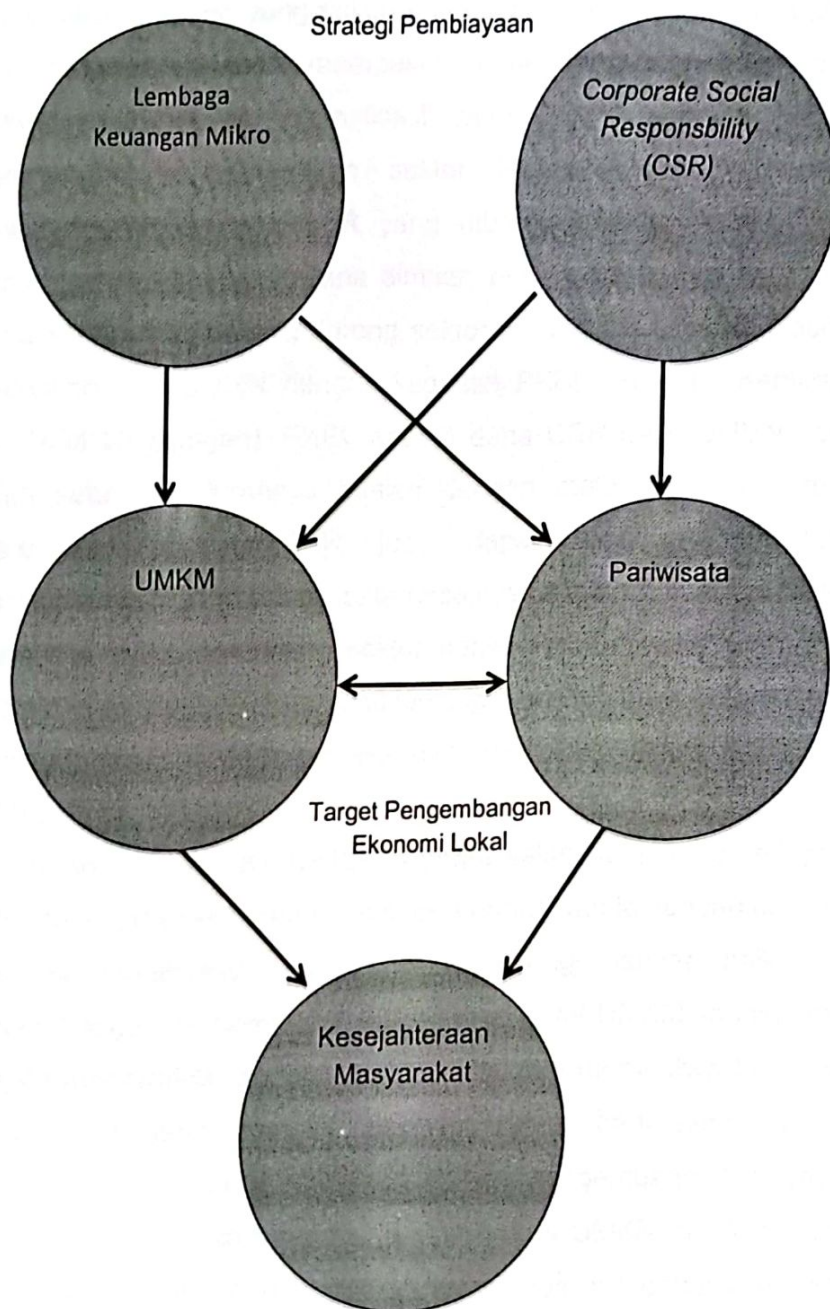
Dengan demikian dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha
2. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
3. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran

4. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Dalam konteks pembangunan wilayah, keberhasilan PEL akan mendorong percepatan pertumbuhan wilayah yang berkembang dan tertinggal. Sehingga akan berkurangnya anggapan eksploitasi pembangunan wilayah maju terhadap wilayah miskin (kesenjangan wilayah). Pada akhirnya, konsep PEL menjadi alternatif bagi pengembangan wilayah yang didasarkan atas pembangunan kapasitas lokal (sumberdaya alam, manusia, kelembagaan) semakin berkembang.

Guna mencapai indikator pengembangan ekonomi lokal maka dibutuhkan suatu usaha nyata, melalui implementasi pengembangannya dengan penerapan alternatif model sebagaimana tersaji pada gambar 5.1. Berdasarkan model tersebut terdapat hubungan yang nyata antara adanya sumber-sumber pembiayaan diantaranya adalah dengan mengoptimalkan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan juga dana CSR dari sektor swasta, yang dapat dijadikan alternatif pilihan pengambil kebijakan dalam mengembangkan ekonomi lokal. Usaha ini dapat dilakukan dengan cara menyiapkan segala kebutuhan infrastruktur dan penunjang dari aspek legal formal agar adanya peluang pengembangan strategi pembiayaan melalui dua alternatif tersebut dapat berjalan. Kemajuan LKM sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang dekat dengan masyarakat akan mendorong tumbuhnya perekonomian lokal secara lebih cepat. Hal ini dapat terjadi mengingat LKM yang ada di Kabupaten Batang berada dan dekat dengan masyarakat dan UMKM. Dengan dukungan pemerintah kebijakan pemerintah maka hal ini dapat lebih mudah diwujudkan. Secara lebih spesifik LKM juga dapat menjadi sumber pembiayaan bagi UMKM yang bergerak dan menunjang sektor pariwisata.



Gambar 5.1. Alternatif Model Penguatan Ekonomi Lokal

Peran CSR dalam suatu pengembangan lingkungan masyarakat saat ini tentunya berdampak pada kecepatan kemajuan pengembangan suatu daerah. Adanya banyak perusahaan telah wajib memiliki dana CSR sesuai dengan aturan perundang-undangan

menjadikan peluang yang cukup tinggi dalam pengembangan UMKM dan pariwisata. Hal ini merupakan salah satu celah yang dapat dimanfaatkan, yakni optimalisasi peran CSR sebagai sumber pembiayaan pengembangan sektor tersebut. Sebagai ilustrasi misalnya adanya dana CSR yang diberikan sektor swasta dapat digulirkan dalam bentuk dana simpan pinjam (*revolving fund*) yang pada akhirnya dapat mendorong sektor riil. Praktik seperti ini sudah dijalankan oleh BUMN dengan kegiatan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). PKBL adalah dana CSR pada BUMN, yang salah satu penyalurannya adalah dengan metode *revolving fund*. Disisi lain adanya CSR juga dapat dijadikan pendukung pengembangan sektor pariwisata misalnya dengan dukungan sarana prasarana yang menunjang sektor pariwisata. Sehingga CSR tidak semata-mata menggulirkan dana tapi juga dalam bentuk program atau kegiatan yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batang.

Adanya fenomena UMKM sebagai salah satu sektor riil yang paling tangguh dalam menghadapi perubahan dan tantangan ekonomi saat ini menjadikan suatu peluang yang sangat baik bagi pengembangan ekonomi lokal. Hal ini mengingat UMKM sangat dekat dengan masyarakat. Kemajuan UMKM adalah merupakan kemajuan ekonomi riil yang memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pengambil kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal dapat fokus dalam memperhatikan sektor UMKM ini. Sementara itu sektor pariwisata disuatu daerah khususnya di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan adanya UMKM. Hal ini mengingat kemajuan pariwisata akan saling terkait dengan kemajuan sektor UMKM. Sebagai ilustrasi adanya kemajuan pariwisata akan mendorong banyaknya pedagang yang menjadi penunjang pariwisata tersebut. Semakin banyak pengembangan pariwisata maka semakin banyak pengembangan UMKM dan akan semakin besar peluang

pembangunan ekonomi lokal dan pada akhirnya akan dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.

BAB V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam rangka penguatan ekonomi lokal dibutuhkan rencana dan kebijakan strategis yang dapat diimplementasikan. Kajian ini menyimpulkan bahwa rencana dan kebijakan strategis penguatan ekonomi lokal dapat berjalan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dibutuhkan alternatif sumber pembiayaan diluar APBD seperti optimalisasi peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan penguatan peran swasta melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimiliki.
2. Penguatan pengembangan dan pendayagunaan sektor riil dalam hal ini adalah UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
3. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak hanya bertumpu pada wisata alam saja tetapi jenis wisata lain sesuai dengan perkembangan permintaan masyarakat.
4. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Pemerintah Kabupaten Batang harus memanfaatkan peluang yang ada dan menjadikan ancaman sebagai peluang, serta menggunakan kekuatan yang dimiliki dan merubah kelemahan menjadi kekuatan.

B. Rekomendasi

Sejalan dengan simpulan hasil kajian ini, direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Batang hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan penguatan ekonomi lokal agar terjadi harmonisasi antar peraturan, sehingga satu peraturan dengan peraturan lain saling menguatkan dan mendukung.

2. Menyusun atau melakukan perbaikan peraturan daerah yang terkait dengan penguatan ekonomi lokal sebagai dasar pijakan dan landasan hukum implementasi rencana dan kebijakan strategis penguatan ekonomi lokal. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah yang mengatur tentang peran Lembaga Keuangan Mikro dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah, pengembangan dan pendayagunaan UMKM, optimalisasi dana CSR dari sektor swasta guna mendukung pembangunan ekonomi daerah, pengembangan sektor pariwisata dalam bentuk cetak biru (*blue print*) kepariwisataan untuk jangka menengah dan jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Batang.
3. Melakukan kajian lebih mendalam dan substansial masing-masing sektor dan bidang yang terkait dengan perekonomian daerah sebelum mencanangkan penguatan ekonomi lokal sebagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Batang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2007, *Perkembangan Perekonomian Daerah Jawa Tengah Tri Wulan II*
- Bryson, John M., 2003, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi, dan Sasaran*, UII Press Yogyakarta
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman (terjemahan), 1984, *Analisis Data kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Rangkuti, F., 2001, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta